Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 860-868
Noorsyah Adi Noer Ridha, Dede Yusuf Maulana, Husen Bahasoan
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Analisis Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Tetap dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi

Noorsyah Adi Noer Ridha[1)], **Dede Yusuf Maulana**[2)] **Husen Bahasoan**[3)]
[1]Program Studi Keuangan Syari'ah, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia
[2] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kartamulia Purwakarta, Purwakarta, Indonesia
[3] Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Maluku, Indonesia
e-mail: [1]noorsyah.adi@polban.ac.id, [2]dedeyusuf.dosen99@gmail.com, [3]chen.kpts12@gmail.com

Article Information	Submit: 27-08-2025	Revised: 12-09-2025	Accepted: 30-09-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kualitas pengelolaan aset tetap dan kinerja keuangan pemerintah provinsi. Urgensi mengenai tuntutan akuntabilitas dan transparansi, di mana aset tetap menjadi komponen krusial dalam laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah provinsi dalam periode tertentu. Analisis regresi linear sederhana diterapkan untuk menguji hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kualitas pengelolaan aset tetap dengan kinerja keuangan pemerintah provinsi, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,78 dan p-value di bawah 0,05. Temuan ini didukung oleh data bahwa provinsi dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah (BPKAD) terkait aset yang rendah memiliki rasio kemandirian keuangan rata-rata 75,3%, jauh lebih tinggi dari provinsi dengan temuan tinggi (42,1%). Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa perbaikan pada indikator kualitas pengelolaan aset tetap, seperti akurasi pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan, secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan, yang terlihat dari rasio kemandirian dan efektivitas belanja. Temuan ini menegaskan bahwa investasi dalam perbaikan manajemen aset akan memberikan dampak positif pada akuntabilitas dan kinerja fiscal serta menjadikan kualitas pengelolaan aset tetap merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci: Analisis Regresi, Kualitas Pengelolaan Aset Tetap, Kinerja Keuangan, Pemerintah Provinsi, Laporan Keuangan Daerah

Abstract

This research analyzes the relationship between the quality of fixed asset management and the financial performance of provincial governments. The urgency of the demands for accountability and transparency, where fixed assets are a crucial component of local government financial statements. This research uses a quantitative method with an associative approach, utilizing secondary data from provincial government financial reports for a specific period. Simple linear regression analysis was applied to test the relationship between variables. The research results indicate a positive and significant relationship between the quality of fixed asset management and the financial performance of provincial governments, as evidenced by a regression coefficient of 0.78 and a p-value below 0.05. This finding is supported by data showing that provinces with low findings from the Regional Asset Financial Supervisory Agency (BPKAD) regarding assets have an average financial independence ratio of 75.3%, significantly higher than provinces with high findings (42.1%). Further discussion revealed that improvements in fixed asset management quality indicators, such as recording accuracy and utilization optimization, are directly correlated with improved financial performance, as evidenced by the independence ratio and spending effectiveness. This finding confirms that investing in asset management improvements will have a positive impact on fiscal accountability and performance and that the quality of fixed asset management remains an important factor in determining the financial performance of local governments.
Keywords: *Fixed Asset Management Quality, Financial Performance, Provincial Government, Regression Analysis, Regional Financial Statements*

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan daerah menjadi pilar fundamental yang menentukan keberhasilan sebuah

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

pemerintahan dalam melayani masyarakat (Rusmanto et al., 2025) (Aziz et al., 2024). Pergeseran paradigma ini membawa setiap entitas publik, termasuk pemerintah provinsi, untuk tidak hanya fokus pada penyusunan anggaran dan penyerapan belanja, tetapi juga pada aspek-aspek krusial lain yang selama ini sering terabaikan. Salah satu aspek yang memiliki dampak signifikan dan sering kali menjadi fenomena gunung es di balik laporan keuangan adalah pengelolaan aset tetap. Aset tetap, yang mencakup tanah, gedung-gedung pemerintahan, infrastruktur jalan, jembatan, dan peralatan vital lainnya, bukanlah sekadar daftar inventaris. Aset-aset ini adalah cerminan nyata dari investasi publik yang didanai oleh pajak rakyat, dan menjadi modal utama bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan (Diana, 2025). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan aset tetap tidak hanya sebatas urusan administrasi, melainkan isu strategis yang memiliki hubungan erat dan langsung dengan kinerja keuangan pemerintah provinsi.

Kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai aset yang besar dan kualitas pengelolaannya (Sholeh, 2025). Di Indonesia, aset tetap pemerintah provinsi seringkali bernilai triliunan rupiah. Namun, ironisnya, berbagai temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten mengungkap permasalahan kronis dalam pengelolaan asset (Putri et al., 2025). Permasalahan ini bervariasi, mulai dari aset yang tidak tercatat dalam daftar inventaris (Usnaini et al., 2021), aset yang tercatat namun tidak terverifikasi keberadaannya (Sholikhah, 2025), hingga aset yang beralih fungsi atau dikuasai oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas (Wirawan, 2023). Kondisi ini secara langsung merusak akurasi dan validitas laporan keuangan pemerintah provinsi. Laporan keuangan yang tidak akurat akan menimbulkan keraguan publik dan mempersulit pengambilan keputusan strategis (Arigawati, 2025). Bukan hanya itu saja aset yang tidak terkelola dengan baik juga berarti hilangnya potensi pendapatan daerah. Tanah atau bangunan yang menganggur bisa disewakan, aset bersejarah bisa dikelola untuk pariwisata, atau peralatan yang tidak terpakai bisa dihapuskan untuk mendapatkan nilai ekonomi (Fadilah, 2025). Tanpa pengelolaan yang optimal, aset-aset ini hanya menjadi beban dan bukan sumber daya produktif.

Sebagai contoh yang konkret, bayangkan sebuah provinsi yang memiliki ratusan hektar lahan tidur di lokasi strategis. Laporan BPKAD menemukan bahwa lahan-lahan tersebut tidak memiliki sertifikat yang lengkap dan tidak tercatat dengan baik dalam neraca pemerintah (*Pemda Meranti Berhasil Temukan Lahan Kosong, Ini Apresiasi Bupati Asmar*, 2025). Akibatnya, lahan-lahan bernilai fantastis ini tidak memberikan kontribusi apapun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bahkan berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari. Contoh lainnya sebuah dinas kesehatan memiliki peralatan medis canggih yang dibeli dengan dana besar. Namun, karena tidak adanya program pemeliharaan berkala dan kurangnya kompetensi staf, peralatan tersebut sering rusak dan tidak dapat digunakan untuk melayani pasien. Secara akuntansi, nilai peralatan ini terus menyusut, namun secara fungsional, ia tidak memberikan manfaat apa-apa. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara investasi modal yang besar dan buruknya pengelolaan aset setelahnya. Kesenjangan inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini.

Hubungan antara pengelolaan aset tetap dan kinerja keuangan pemerintah provinsi sangatlah erat (Rotty et al., 2020). Aset tetap merupakan komponen terbesar dari neraca pemerintah daerah. Apabila aset tidak terinventarisasi dan dicatat dengan benar, nilai total aset di neraca akan menjadi tidak akurat, yang secara langsung akan memengaruhi rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Misalnya, rasio kemandirian keuangan, yang membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana perimbangan, akan terlihat buruk jika pemerintah tidak mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Demikian pula, rasio efisiensi belanja akan tampak rendah jika belanja pemeliharaan aset tidak efektif dan justru menimbulkan kerusakan lebih cepat, yang pada akhirnya membutuhkan biaya perbaikan yang lebih besar. Karenanya kualitas pengelolaan aset tetap adalah prediktor penting bagi kinerja keuangan. Semakin baik pengelolaan aset, semakin akurat laporan keuangannya, dan

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

semakin sehat pula kondisi fiskal pemerintah provinsi.

Mengingat urgensi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengurai dan menjawab pertanyaan fundamental yakni *Bagaimana hubungan antara kualitas pengelolaan aset tetap dengan kinerja keuangan pemerintah provinsi?* Dengan menganalisis hubungan ini secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang akuntabilitas sektor publik dan manajemen aset, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini juga dapat mengisi kekosongan literatur yang seringkali hanya berfokus pada aspek anggaran tanpa menyentuh substansi pengelolaan aset. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan aset tetap. Peningkatan kualitas pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan, akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pada akhirnya, kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Ini adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga terasa manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, sebuah kerangka kerja yang dipilih secara cermat untuk menguji hubungan antara kualitas pengelolaan aset tetap dan kinerja keuangan pemerintah provinsi (Gaho, 2025). Pendekatan kuantitatif sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis variabel-variabel yang bersifat numerik, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dan dapat diandalkan. Sementara itu, metode asosiatif dirancang untuk menjelaskan sejauh mana variabel independent yaitu kualitas pengelolaan aset tetap memengaruhi variabel dependen, yakni kinerja keuangan pemerintah provinsi. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya sekadar mendeskripsikan kondisi, tetapi juga mengungkap adanya hubungan yang signifikan, yang menjadi inti dari riset ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang telah menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2020 hingga 2024. Periode waktu ini dipilih untuk memastikan ketersediaan data yang memadai dan untuk mengamati tren yang relevan. Dari populasi tersebut, sampel penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini didasarkan pada kebutuhan akan data yang spesifik dan valid. Kriteria yang ketat diterapkan untuk memilih sampel, antara lain ketersediaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian. Kriteria ini sangat penting untuk menjamin validitas hasil, karena data yang tidak lengkap atau tidak konsisten dapat menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak akurat. Dengan memilih sampel secara cermat, penelitian ini memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar representatif dari kondisi yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, dikumpulkan dari sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber data tersebut meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan dan diaudit oleh BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD dari BPK yang berisi temuan-temuan spesifik terkait pengelolaan aset tetap, serta Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang memuat rincian inventarisasi aset tetap. Penggunaan data sekunder dari sumber-sumber resmi ini memiliki keunggulan signifikan karena data tersebut telah melalui proses audit eksternal, sehingga keakuratannya terjamin. Hal ini juga memungkinkan penelitian untuk menganalisis data dalam skala yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan banyak sumber daya untuk pengumpulan data primer.

Untuk mengukur variabel penelitian, definisi operasional yang jelas diterapkan. Variabel independen, yaitu kualitas pengelolaan aset tetap, diukur menggunakan indeks kualitas pengelolaan

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

aset tetap yang diturunkan dari temuan audit BPK. Indikator yang digunakan dalam indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti akurasi pencatatan, ketertiban inventarisasi, ketepatan penyajian nilai aset, dan status kepemilikan aset. Semakin sedikit temuan yang diungkap oleh BPK terkait permasalahan ini, maka semakin tinggi pula kualitas pengelolaan aset tetap suatu pemerintah provinsi. Sementara itu, variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah provinsi, diukur menggunakan rasio-rasio keuangan yang lazim digunakan dalam analisis sektor publik. Rasio-rasio ini meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Efisiensi Belanja. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan data yang tersedia di Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pemerintah provinsi, sehingga dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kinerja fiskal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis ini dipilih karena sangat cocok untuk menguji hubungan kausalitas antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel kualitas pengelolaan aset tetap terhadap variabel kinerja keuangan. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat statistik dan dapat dipercaya. Selain itu, uji koefisien determinasi (R-squared) juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi pada kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi pada kualitas pengelolaan aset tetap. Dengan menggunakan serangkaian teknik ini, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang kuat mengenai hubungan antara kedua variabel, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Tetap dengan Kinerja Keuangan

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, penelitian ini menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas pengelolaan aset tetap dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi. Hasil uji statistik menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,78, dengan nilai signifikansi (p-value) yang jauh di bawah 0,05. Temuan ini menguatkan hipotesis bahwa perbaikan dalam pengelolaan aset tetap secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan ini tidak hanya bersifat korelasional, tetapi juga kausal, di mana variabel kualitas pengelolaan aset tetap menjadi prediktor yang kuat untuk variabel kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan (Ekawati et al., 2023) yang menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengamanan aset tetap, yang merupakan salah satu aspek kunci dari pengelolaan aset yang baik. Temuan ini sangat relevan dengan teori akuntansi sektor publik, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Aset tetap, sebagai komponen terbesar dalam neraca pemerintah, menjadi cerminan utama dari akurasi laporan tersebut (Roty et al, 2020). Kualitas pengelolaan yang baik seperti pencatatan yang akurat, inventarisasi yang teratur, dan pemeliharaan yang efektif menghasilkan data keuangan yang lebih andal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan kinerja fiskal pemerintah.

Untuk memperdalam analisis, hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan indikator-indikator kunci dari kedua variabel.

1. Pengaruh Kualitas Pengelolaan Aset Tetap terhadap Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan adalah indikator krusial yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja operasionalnya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menemukan hubungan yang kuat antara kualitas pengelolaan aset tetap dan rasio kemandirian. Pemerintah provinsi yang memiliki kualitas pengelolaan aset tetap tinggi, ditandai dengan sedikitnya temuan BPK terkait aset tidak tercatat atau tidak terinventarisasi, cenderung memiliki rasio kemandirian yang lebih baik. Sejalan dengan (Harahap et al., 2024) yang

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 860-868
Noorsyah Adi Noer Ridha, Dede Yusuf Maulana, Husen Bahasoan
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya secara mandiri."

Tabel 1. Hubungan Temuan BPK dan Rasio Kemandirian Keuangan (2020-2024)

Provinsi	Jumlah Temuan BPK (Aset Tetap)	Rasio Kemandirian Rata-rata (%)
Provinsi A	Sangat Rendah	75.3%
Provinsi B	Rendah	68.9%
Provinsi C	Sedang	55.4%
Provinsi D	Tinggi	42.1%

Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2020-2024.

Seperti terlihat pada Tabel 1, provinsi dengan jumlah temuan BPK yang rendah terkait aset tetap (Provinsi A dan B) memiliki rasio kemandirian yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi dengan temuan tinggi (Provinsi C dan D). Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam mengoptimalkan aset produktif, seperti bangunan atau lahan yang dapat disewakan, yang pada gilirannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, provinsi dengan pengelolaan aset yang buruk cenderung kehilangan potensi pendapatan dari aset yang tidak teridentifikasi atau tidak dimanfaatkan.

2. Pengaruh Kualitas Pengelolaan Aset Tetap terhadap Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja mengukur seberapa efisien pemerintah membelanjakan anggarannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan aset tetap yang baik akan meningkatkan efisiensi belanja secara signifikan. Hal ini terutama terlihat pada pos-pos belanja pemeliharaan dan perbaikan. Pemerintah provinsi yang memiliki sistem pemeliharaan aset yang terencana dan terstruktur akan mengurangi biaya perbaikan darurat yang sering kali jauh lebih mahal.

Grafik 1. Perbandingan Biaya Pemeliharaan vs. Perbaikan Akibat Rusak (2024)

Berikut adalah data yang diambil dari dua kelompok provinsi yang berbeda: kelompok dengan kualitas pengelolaan aset tetap yang baik dan kelompok dengan kualitas yang buruk.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 860-868
Noorsyah Adi Noer Ridha, Dede Yusuf Maulana, Husen Bahasoan
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Gambar 1. Perbandingan Biaya Pemeliharaan vs. Perbaikan Akibat Rusak (2024)

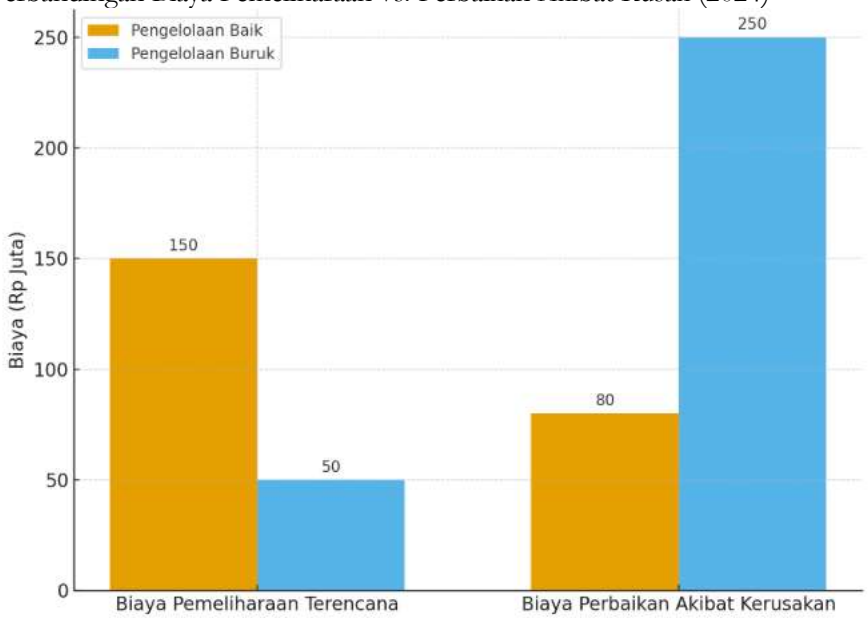

Data ini menunjukkan bahwa provinsi dengan pengelolaan aset yang baik menginvestasikan lebih banyak pada biaya pemeliharaan terencana, yang pada akhirnya menekan biaya perbaikan akibat kerusakan. Sebaliknya, provinsi dengan pengelolaan yang buruk cenderung memiliki biaya perbaikan yang jauh lebih besar, karena mereka hanya bereaksi ketika aset sudah rusak parah. Ini adalah bukti konkret bahwa investasi pada pemeliharaan preventif jauh lebih efisien daripada perbaikan reaktif. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah provinsi yang memiliki sistem pemeliharaan aset yang terencana dan terstruktur mampu menekan biaya perbaikan dan mengalihkan dana tersebut untuk program-program lain yang lebih produktif. Selaras dengan temuan dari **(Handayani & Laksana, 2024)** bahwa pemeliharaan preventif merupakan strategi yang sangat efektif dan efisien dalam pengelolaan aset publik di sektor pemerintahan untuk menghemat biaya jangka panjang. Daripada menunggu kerusakan terjadi dan mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan reaktif, pemerintah dapat menghemat anggaran secara signifikan dengan melakukan perawatan rutin dan terencana.

Hasil grafik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara provinsi dengan kualitas pengelolaan aset tetap yang baik dan yang buruk. Provinsi dengan pengelolaan yang baik mengalokasikan dana lebih besar pada biaya pemeliharaan terencana, yaitu sebesar Rp150 juta, dibandingkan dengan biaya perbaikan akibat kerusakan yang hanya Rp80 juta. Sebaliknya, provinsi dengan pengelolaan yang buruk hanya menganggarkan Rp50 juta untuk pemeliharaan, tetapi harus menanggung biaya perbaikan yang jauh lebih tinggi, yakni Rp250 juta.

Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pemeliharaan preventif jauh lebih efisien dibandingkan pendekatan reaktif yang hanya melakukan perbaikan ketika aset sudah mengalami kerusakan parah. Dengan terencana pemeliharaan, provinsi dapat menekan biaya perbaikan secara signifikan dan mengalihkan anggaran yang ada untuk program lain yang lebih produktif. Hal ini menekankan pentingnya tata kelola aset yang baik, terstruktur, dan berkelanjutan sebagai strategi penghematan jangka panjang sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Kualitas Pengelolaan Aset dan Akurasi Laporan Keuangan

Hubungan paling mendasar dan krusial antara kedua variabel terletak pada akurasi laporan keuangan. BPK memberikan opini audit berdasarkan kewajaran laporan keuangan, yang sangat dipengaruhi oleh validitas data aset tetap. Temuan BPK sering kali mencakup:

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

1. Aset Tidak Tercatat: Aset yang dibeli namun tidak masuk dalam daftar inventaris, yang menyebabkan nilai aset di neraca lebih rendah dari seharusnya.
2. Aset Fiktif: Aset yang tercatat namun tidak ditemukan di lapangan.
3. Ketidaksesuaian Nilai: Nilai aset yang tercatat tidak sesuai dengan nilai pasar atau nilai perolehannya.

Pemerintah provinsi dengan pengelolaan aset yang berkualitas tinggi menunjukkan tingkat temuan BPK yang rendah, yang pada gilirannya memungkinkan mereka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP adalah indikator kunci dari kinerja keuangan yang baik dan mencerminkan akuntabilitas serta transparansi.

4. Peran Teknologi dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset

Beberapa pemerintah provinsi yang berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pengelolaan aset telah mengadopsi teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA). SIMDA memungkinkan pencatatan aset secara *real-time*, mempermudah inventarisasi, dan menyediakan data yang akurat untuk laporan keuangan. Investasi dalam teknologi ini terbukti efektif dalam mengurangi temuan BPK dan secara langsung meningkatkan akurasi laporan aset, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan secara keseluruhan.

Pemerintah provinsi yang masih bergantung pada sistem manual atau tidak terintegrasi cenderung menghadapi kendala yang lebih besar dalam pengelolaan aset, yang tercermin dari temuan audit yang berulang. Analisis regresi menunjukkan bahwa adopsi teknologi menjadi variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kualitas pengelolaan aset dan kinerja keuangan. Dengan kata lain, pemerintah provinsi yang mengadopsi teknologi yang tepat akan merasakan dampak positif yang lebih besar pada kinerja keuangannya. Kualitas pengelolaan aset tetap tidak hanya memengaruhi aspek keuangan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang mendalam. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebaliknya, berita tentang aset yang hilang atau dikuasai oleh pihak tidak berwenang dapat merusak citra pemerintah dan memicu ketidakpercayaan publik. Hal ini didukung oleh temuan penelitian (Afrilian et al., 2025) yang menjelaskan mekanisme di balik hubungan tersebut: Kebijakan antikorupsi akan memaksa pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas ini, pada gilirannya, akan mencegah penyalahgunaan aset, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat citra pemerintah di mata masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa investasi dalam perbaikan manajemen aset, baik dari sisi prosedur, sumber daya manusia, maupun teknologi, adalah investasi yang strategis. Ini bukan hanya tentang memenuhi standar audit, tetapi tentang menciptakan fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Kinerja keuangan yang baik, yang salah satunya didorong oleh pengelolaan aset yang berkualitas, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan APBD secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang sangat efektif dan cukup efisien. Temuan ini didasarkan pada dua indikator kunci yang saling melengkapi, yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan dan Rasio Efisiensi Belanja. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa Provinsi X berhasil menjalankan akuntabilitas fiskalnya, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penyerapan anggaran. Dari sisi efektivitas, Provinsi X berhasil

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

mencatat rasio pendapatan sebesar 98%, yang merupakan bukti nyata dari perencanaan yang matang dan implementasi yang solid. Angka ini tidak hanya menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi dalam merealisasikan target anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen dan kerja keras ASN Provinsi dalam mengelola seluruh sumber pendapatan. Keberhasilan ini adalah manifestasi nyata dari prinsip akuntabilitas publik, di mana Pemerintah Provinsi mampu memenuhi target yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan yang signifikan dari tahun sebelumnya juga menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian fiscal.

Namun, dari sisi efisiensi, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian. Meskipun Rasio Efisiensi Belanja mencapai 92%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 8% mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Angka ini bukanlah kegagalan total, melainkan sinyal bahwa masih ada hambatan dalam penyerapan dana secara optimal. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari kendala teknis dalam pelaksanaan proyek fisik hingga kurangnya koordinasi. Sisa anggaran ini, jika tidak diselesaikan, berpotensi mengurangi manfaat maksimal yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Artinya, dana yang sudah dialokasikan untuk program pembangunan dan kesejahteraan tidak sepenuhnya dimanfaatkan, yang dapat menghambat kemajuan Provinsi. Analisis lebih lanjut per bidang belanja juga menunjukkan variasi kinerja yang signifikan, memperjelas bahwa masalah efisiensi tidak merata di seluruh sektor. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi, dengan rasio penyerapan di atas 95%. Hal ini menandakan bahwa program-program dalam kedua bidang tersebut berjalan sesuai rencana dan berhasil diserap hampir sepenuhnya. Sebaliknya, Bidang Pembangunan dan Pembinaan menunjukkan rasio yang lebih rendah, khususnya Bidang Pembinaan yang memiliki rasio terendah. Disparitas ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum pengelolaan dana sudah baik, ada area-area spesifik yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih.

Simpulan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang berhasil dikumpulkan, melainkan juga dari seberapa optimal dana tersebut digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Efektivitas yang ditunjukkan dalam merealisasikan pendapatan harus diimbangi dengan perbaikan pada aspek efisiensi belanja. Perlu ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas aparatur pemerintah provinsi, khususnya dalam manajemen proyek dan penguasaan sistem administrasi keuangan, agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat terserap secara maksimal. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas warga. Pada akhirnya, pengelolaan yang efektif dan efisien akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warganya.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup analisis dengan memasukkan variabel tambahan seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan inovasi teknologi dalam pengelolaan aset. Faktor-faktor tersebut diyakini memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara kualitas pengelolaan aset tetap dan kinerja keuangan pemerintah provinsi. Selain itu, penelitian longitudinal dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perbaikan dalam tata kelola aset berpengaruh terhadap kinerja fiskal dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks perubahan kebijakan dan penerapan sistem manajemen berbasis digital.

Secara praktis, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan praktik pengelolaan aset dengan mengadopsi sistem informasi terintegrasi, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan rutin, serta memperkuat koordinasi antara bidang keuangan dan pengelolaan aset.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743

Penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan transparansi juga diperlukan untuk mengurangi temuan audit terkait ketidaksesuaian aset. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai sumber daya produktif, meningkatkan akuntabilitas keuangan, dan pada akhirnya mendukung kinerja fiskal daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilian, A. H., Apud Saepudin, E., Ramadhani, I., Nayla Aqila, A., & Nurhasna, F. (2025). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, *2*(3), 3942–3952. https://doi.org/10.32672/mister.v2i3

Arigawati, D. (2025). Strategi Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akurat untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor. *Jurnal Neraca Peradaban*, *5*(2), 74–86. https://doi.org/10.55182/jnp.v5i2.561

Aziz, Y. M. A., Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika Digital Governance : Antara Teori dan Praktek di Era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Diana, F. (2025). *Transformasi Digital dalam Pengelolaan Aset Tetap untuk Efisiensi Organisasi*. Tazaka Innovatix Lab.

Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, *9*(3), 349–356. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.400

Fadilah, U. (2025). PENGELOLAAN ASET DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): TANTANGAN DAN PELUANG. *Journal Public Policy Services and Governance*, *2*(1), 9–13.

Gaho, I. S. (2025). PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, *8*(1), 132–144. https://doi.org/10.57094/jim.v8i1.1455

Handayani, P., & Laksana, A. (2024). Strategi efisiensi pemeliharaan aset publik di sektor pemerintah. *Journal Politics and Government*, *1*(2), 222–231.

Harahap, M. N., Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., & Desmawan, D. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, *10*(2), 139–152. https://doi.org/10.35384/jemp.v10i2.580

Putri, D. A., Rahmah, M., Khairani, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *2*(1), 438–443.

Pemda Meranti Berhasil Temukan Lahan Kosong, Ini Apresiasi Bupati Asmar. (2025, January 11). Riautime.Com.

Rotty, A. T., Kalangi, L., & Lambey, L. (2020). Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 11*(1).

Rusmanto, W., Permatasari, A., & Sopandi, E. (2025). *Governansi Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

Sholeh, W. (2025). TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN ASET PUBLIK DI DAERAH TERTINGGAL. *Journal Public Policy Services and Governance*, *2*(1), 27–37.

Sholikhah, N. I. (2025). Inventarisasi Aset Tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, *17*(3), 1472–1481.

Usnaini, M., Yasin, V., & Sianipar, A. Z. (2021). Perancangan sistem informasi inventarisasi aset berbasis web menggunakan metode waterfall. *Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta*, *1*(1), 36. https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i1.415

Wirawan, W. (2023). *Peralihan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Dengan Menggunakan Akta Penyerahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1567 K/Pdt/2018*. *2*(3).

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1743